PENGARUH PENGAWASAN INTERN DAN *GOOD GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
(Survey pada Dinas SKPD Pemerintah Kabupaten Cianjur)

PEMBIMBING
Prof. Dr. Hj. Dwi Kartini, S.E., Spec., Lic
Inta Budi Setya Nusa SE.,M.Ak

OLEH:
IMAS MAESAROH

UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the description of the internal control variables, good governace and local government performance, as well as determine the effect of internal controls and internal audit functions of local government performance and simultaneously partially.

The study arranged by using survey method. The population in the study were all Department Cianjur district government as much as 17 departments with the number of respondents 35 people. Data collected by interview and questionnaire techniques.

The method used in this research is descriptive and verifikatif method. Descriptive methods are used to find a picture of each variable studied. While verifikatif with multiple regression analysis used to determine the effect of internal controls and good governance on local government performance. Statistical test used is the calculation of correlation, multiple regression, the coefficient of determination, and test hipotess with the help of SPSS 21 for window applications.

Results of research at the city government officie in Cianjur showed that internal controls work well and function of the internal audit was going well. Internal control and internal audit function has a positive effect on the local government performance.

Keywords: Internal Control, Good Governance, Local Government Performance

I. PENDAHULUAN

Negara mempunyai suatu pemerintahan yang berfungsi sebagai kesatuan organisasi. Pemerintahan Pusat maupun Daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan (Wawan dan Lia, 2009). Dalam suatu sistem pemerintahan yang demokratis, pembuatan undang-undang dan penggunaan sumber daya publik harus dapat membawa kewajiban bagi pihak yang memperoleh mandat untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut untuk mempertanggungjawabkan atas tindakan mereka secara terbuka kepada rakyat dan stakeholder yang telah memberikan mandat tersebut. Untuk menyelenggarakan pemerintahan, pemerintah memungut berbagai macam jenis pendapatan dari rakyat yang digunakan untuk penyelenggaraan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada rakyat, pelaksanaan pembangunan, dan banyak kegiatan yang harus dilaksanakan. Untuk dapat melaksanakan tujuan tersebut Pemerintah Daerah di beri kewenangan untuk melaksanakan urusan pembangunan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang disebut otonomi (Wawan Sukmana dan Lia, 2009).

Sebagaimana yang dimaksudkan di dalam Undang-undang No.22 tahun 1999 yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan

keuangan pusat dan daerah yang diamandemen dengan Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.. Salah satu wewenang yang menjadi urusan rumah tangganya sendiri adalah bidang Keuangan Daerah. Pengurus keuangan ini diantaranya adalah penyelenggaraan penyusunan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah sebagaimana yang dimaksud di dalam Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 (Wawan Sukmana dan Lia, 2009).

TAP MPR No. XV/MPR/1998 tentang "Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia" merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah (Mardiasmo: 2002 dalam Anggi Fawzi).

Kebijakan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk mendorong peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan kinerja pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien (Prima Yuda, 2012). Kinerja pemerintahan yang buruk dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis (Sri Mifti Dkk, 2009). Dimensi lain penyebab buruknya kinerja perusahaan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Seperti diketahui, budaya suap - menyuap, kolusi-korupsi dan nepotisme (KKN) masih marak mewarnai praktik bisnis di Indonesia (Sri Mifti Dkk, 2009).

Dalam mewujudkan kinerja pemerintah yang memuaskan berupa tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), pemerintah terus melakukan berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan trasparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara/Daerah, salah satunya dengan penyempurnaan sistem administrasi Negara secara menyeluruh (LAN, 2000). Salah satu cara yang ditempuh pemerintah dengan menerbitkan dan menyempurnakan perangkat peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan Negara/Daerah (Abdul Rohman, 2009). Melaksanakan *Good governance* yang baik tentu kinerja suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut. Hal ini dapat diberikan kesimpulan bahwa apabila pelaksanaan *Good governance* ditingkatkan maka otomatis dapat meningkatkan kinerja organisasi itu sendiri (Budi Mulyawan, 2009). Keberhasilan pelaksanaan *Good governance* dapat dinilai dari kepatuhan terhadap prinsip-prinsip pendukungnya. Prinsip-prinsip *Good governance* menurut LAN (2000) terdiri dari prinsip akuntabilitas; prinsip transparansi; prinsip kesetaraan; prinsip supremasi hukum; prinsip keadilan; prinsip *partisipasi*; prinsip *desentralisasi*; prinsip kebersamaan; prinsip rofesionalisme; prinsip cepat tanggap; prinsip *efektif* dan *efisien*; prinsip berdaya saing (Nining Ade Dkk, 2011).

Untuk mewujudkan kinerja pemda dengan pemerintahan yang baik *(Good governance)* yang sesuai dengan *value for money (economy, efficiency, effective)*, perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengawasan intern (*internal control*) yang merupakan suatu fungsi penilaian yang idependen dalam suatu organisasi yang menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan (Boyton dan Kell, 2006).

Pengawasan internal merupakan proses menentukan standar untuk pengawasan, mengukur hasil pekerjaan, membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan bila ada perbedaan, serta mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan (Terry, 1960 dalam Agustinus Widanarto, 2012). Adanya pengawasan memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dapat diamati dan dikelola kesesuaiannya dengan rencana dalam rangka pencapaian tujuan (Terry, 1960 dalam Agustinus Widanarto, 2012). Fungsi pengawasan yang diarahkan pada: peningkatan kinerja organisasi; pemberian opini atas kinerja organisasi; dan pemberian rekomendasi kepada manajemen untuk

melakukan koreksi atas masalah pencapaian kinerja yang ada akan memberikan nilai tambah bagi peningkatan kinerja penyelenggara, baik secara internal maupun eksternal (Ndraha, 2003 dalam Agustinus Widanarto, 2012). Sedangkan peran DPRD dalam melakukan fungsi pengawasan sangat penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan, penyelewengan dan kebocoran dalam penyelenggaraan pemerintahan. Posisi DPRD yang tidak memiliki hubungan kedinasan dengan pemerintah diharapkan menjamin objektivitas pengawasan (Agustinus Widanarto, 2012).

Dengan demikian dengan adanya pengawasan internal dan tata kelola pemerintahan yang baik *(Good governance)* diharapkan menghasilkan kinerja pemerintah daerah yang semakin baik pula. Namun pada faktanya berdasarkan hasil pemeriksaan kinerja pemerintahan yang dilakukan oleh BPK pada tahun 2011 masih terdapat berbagai kasus kinerja pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan *efisiensi*, serta pemeriksaan aspek *efektivitas*. Aspek Ekonomi berkaitan dengan perolehan sumber daya yang akan digunakan dalam proses dengan biaya, waktu, tempat, kualitas dan kuantitas yang benar. Ekonomi berarti meminimalkan biaya perolehan input untuk digunakan dalam proses, sengan tetap menjaga kualitas sejalan dengan prinsip dan praktik administrasi yang sehat dan kebijakan manajemen. Penekanan untuk aspek ekonomi berhubungan dengan perolehan barang atau jasa sebelum digunakan untuk proses. *Efisiensi* merupakan hubungan yang optimal antara input dan output. Suatu entitas dikatakan *efisiensi* apabila mampu menghasilkan output maksimal dengan jumlah input tertentu atau mampu menghasilkan output tertentu dengan memanfaatkan input minimal. *Efektivitas* pada dasarnya adalah pencapaian tujuan. *Efektivitas* berkaitan dengan hubungan antara output dengan tujuan atau sasaran yang akan dicapai (*outcome)*. *Efektif* berarti output yang dihasilkan telah memenuhi tujuan yang telah ditatapkan. (IHPS I Tahun 2011).

Hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK sampai dengan semester 1 tahun 2011, menyimpulkan bahwa program/kegiatan yang diperiksa masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang mempengaruhi kinerja suatu program/kegiatan. Kelemahan-kelemahan tersebut diuraikan sebagai berikut.

LHP BPK yang mengungkapkan indikasi tindak pidana dan telah disampaikan kepada instansi berwenang adalah sebanyak 305 kasus senilai Rp29,51 triliun dan USD 480,88 juta atau ekuivalen dengan nilai Rp4,15 triliun berdasarkan kurs Bank Indonesia per 30 Juni 2011. Dari 305 kasus yang diserahkan tersebut, instansi yang berwenang (kepolosian, kejaksaan, dan KPK) telah menindaklanjuti 166 kasus melalui proses hukum (54,42%) kedalam proses peradilan, yaitu pelimpahan kepada jajaran/penyidik lainnya sebanyak 41 kasus (13,44%), telaahan, gelar perkara dan penelitian sebanyak 21 kasus (3,28%), proses sidang I kasus (0,33%) penuntutan sebanyak 11 kasus (3,61%), vonis/banding sebanyak 47 kasus (15,41%) dan SP3/dihentikan sebanyak 11 kasus (3,61%). sedangkan temuan yang belum ditindaklanjuti atau tidak ada datanya sebanyak 139 kasus (45,57%) (IHP Semester I Tahun 2011).

Temuan Menurut Entitas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada tahun 2010, Kabupaten Cianjur memiliki jumlah kasus sebanyak 5 yang menunjukan kelemahan sistem pengendalian intern. Kelemahan dalam sistem pengendalian intern tersebut diantaranya: 1) Kelemahan dalam sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan, 2) Kelemahan dalam sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja 3) Kelemahan struktur pengendalian intern.

Faktor utama yang melatarbelakangi kelemahan unsur tersebut adalah sumber daya manusia itu sendiri, dalam hal ini pengawasan intern pada organisasi pemerintahan sangat dibutuhkan keberadaannya guna membenahi dan meminimalisir kasus serupa. Selain itu pada tabel tersebut juga menunjukan kasus

ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang – undangan yang mengakibatkan kerugian daerah sebesar Rp183.710.000 dengan kasus sebanyak 3 kasus, yang bisa dikarenakan oleh beberapa faktor seperti belanja atau pengadaan barang fiktif, rekanan pengadaan barang/jasa tidak menyelesaikan pekerjaan, kekurangann volume pekerjaan dan/atau barang, belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan, dan lain sebagainya. Potensi kerugian daerah dengan nilai sebesar Rp279.820.000 dengan kasus sebanyak 1 kasus, yang bisa dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang dan jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sepenuhnya, aset dikuasai pihak lain, pembelian aset yang berstatus sengketa dan lain sebagainya. Kekurangan penerimaan dengan nilai sebesar Rp1. 514.220.000 dengan jumlah kasus sebanyak 3 kasus, yang bisa disebabkan oleh beberapa faktor yaitu penerimaan negara/daerah atau denda keterlambataan pekerjaan belum diterima/disetor ke kas negara/daerah, penggunaan langsung penerimaan daerah, kelebihan pembayaran subsidi oleh pemerintah dan lain sebagainya.

Dan pada sistem administrasi sebanyak 2 kasus, yang bisa terjadi oleh beberapa faktor yaitu pertanggungjawaban tidak akuntabel, pekerjaan dilaksanakan mendahului kontrak atau penetapan anggaran, proses pengadaan barang tidak sesuai ketentuan, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan perlengkapan atau barang milik daerah, dan lain sebagainya, Sehingga total dari keseluruhan jumlah kasus yang terjadi di Kabupaten Cianjur terdapat 9 kasus setelah dilakukan pemeriksaan. Dan akibatnya, negara mendapat kerugian sebesar Rp1.997.760.000.

Sedangkan daftar rekapitulasi hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan pada pemerintah daerah di Kabupaten Cianjur. Mengungkapkan bahwa dari tahun 2005 sampai dengan semester I tahun 2011 secara keseluruhan terdapat 226 temuan pemeriksaan (audit) senilai Rp40,08 triliun serta 401 rekomendasi senilai Rp28,97 triliun.

Dari uraian diatas menggambarkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten Cianjur masih harus terus diperbaiki. oleh karena itu dilakukannya pengawasan intern dan pengelolaan pemerintahan yang baik dapat menggambarkan bagaimana kinerja pemerintahan untuk menunjukan pencapaian hasil yang dicapai. Dalam hal ini, pelaksanaan pengawasan yang efektif dan efisien sangat penting untuk menghindari adanya penyimpangan yang terjadi sebagai bagian dari pengelolaan pemerintahan.

Masalah utama yang dihadapi sekarang adalah Bagaimana penerapan pengawasan intern di Pemkab Cianjur, Bagaimana *Good governance* di Pemkab Cianjur dan Bagaimana Kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur, Seberapa besar peranan pengawasan intern dan *Good governance* terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Atas dasar uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan maksud dan tujuan untuk mengetahui pengaruh pengawasan Intern dan *good goverannce* terhadap kinerja pemerintah daerah pada Dinas SKPD Kabupaten Cianjur.

II. KAJIAN PUSTAKA,KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Pengawasan Intern

Menurut Standar Profesional Akuntan Publik (2001:SA 319.2 Part06) disebutkan “Pengawasan Intern merupakan suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas - yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan yaitu (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku “.

Menurut Wawan & Lia (2009) “Hakikat Pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewenangan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam mencapai

tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi."

Dari beberapa pendapat di atas mengenai pengawasan dapat disimpulkan bahwa pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk mengantisipasi, memonitor, menghindari kesalahan berganda dan mengetahui apakah kegiatan-kegiatan yang berada dalam tanggungjawabnya berada dalam keadaan yang sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditentukan.

2.1.1.2 Unsur-unsur Pengawasan Intern

Menurut Sanyoto Gondodiyoto (2009:154) model (framework) COSO terdiri lima kelompok (unsur-unsur) yang saling berhubungan yang akan menunjang pencapaian tujuan pemerintahan yaitu:

1. *Control environment* (lingkungan pengendalian)

Komponen yang berperan dalam membangun atmosfer (iklim) yang kondusif bagi para karyawan mengenai kesadaran pentingnya kontrol sehingga dapat menciptakan suasana yang dapat membuat karyawan dapat menjalankan dan menyelesaikan tugas kontrol dan tanggungjawabnya masing-masing. Control environment merupakan hal dasar (fondasi) bagi komponen COSO yang lain. Lingkungan pengendalian meliputi factor-faktor seperti *integrity* dan *ethical values of management*, kompetensi personil, *management philosophy and operating style*, bagaimana delegasi tanggungjawab (*responsibility*) dan wewenang (*author*) dijalankan, serta pimpinan sebagai panutan. Manajemen harus paham pentingnya pengendalian intern, memberi contoh, dan memberikan dukungan, serta menyampaikan kepada seluruh karyawan.

2. *Risk Assisment* (penaksiran risiko)

Pengertian "*risk assessment*" pada COSO adalah risiko tidak tercapainya *financial reporting objectives, compliance*, dan *operational objectives*. Proses ini merupakan identifikasi dan analisis risiko yang dapat menghambat atau berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan, serta menentukan cara bagaimana resiko tersebut ditangani. COSO mengarahkan kita melakukan identifikasi terhadap resiko internal maupun eksternal dari ektivitas suatu entity atau individu. Pada tahap risk assessment terdapat *cost-benefit consideration* yang memperhitungkan cost dan benefit yang akan dihasilkan dari suatu penerapan *control*. Artinya, jika biaya untuk pengendalian intern terlalu besar, maka sistem pengendalian intern tersebut sudah tidak punya makna posotif lagi. Risiko bersifat *dynamic*, artinya mengalami perubahan, dan COSO mendorong manajemen terus-menerus melakukan analisis serta memutakhirkan *internal control system*.

3. *Control Activities* (aktivitas pengendalian)

Merupakan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memastikan dilaksanakannya kebijakan manajemen dan bahwa resiko sudah diantisipasi. COSO menekan perlunya integrasi control activities dengan risk assessment. Control activities juga membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk penanganan risiko telah dilakukan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

4. Information *dan Communication* (informasi dan komunikasi)

Komponen ini menjelaskan bahwa sistem informasi sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. Informasi, baik yang diperoleh dari eksternal maupun pengolahan internal merupakan potensi strategis (*potential strategic*).

5. *Memonitorig* (pemantauan)"

Aspek "*monitoring*" COSO mengedepankan kebutuhan manajemen untuk monitor sistem pengendalian intern melalui internal control system itu sendiri. Komponen pemantauan atau pengawasan dijelaskan dalam COSO untuk memastikan kehandalan sistem dan internal control dari waktu ke waktu. Monitoring merupakan proses yang menilai kualitas dari kinerja sistem dan internal control dari waktu ke waktu, yang dilakukan dengan melakukan aktivitas monitoring dengan melakukan evaluasi secara terpisah.

2.1.2 *Good Governance*

2.1.2.1 Pengertian *Good Governance*

Menurut mardiasmo (2002:18) pengertian *Good governance* "Sebagai kepemerintahan yang baik atau sebagai

suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha."

Pengertian *Good governance* Menurut Agus Wahyudin (2009) "Good governance atau tata kelola merupakan pedoman pengelolaan sebuah organisasi dengan orientasi terhadap para stakeholder merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja"

2.1.2.2 Prinsip-prinsip *Good Governance*

Karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan kepemerintahan yang baik (*Good Governance*) dikemukakan oleh UNDP (2004) dalam Dedi Kusmayadi (2009) yaitu meliputi:

1. Partisipasi (Participation): Setiap orang atau warga masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.
2. Akuntabilitas (Accountability): Para pengambil keputusan dalam sektor publik, swasta dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik, sebagaimana halnya kepada stakeholders.
3. Aturan hukum (Rule of law): Kerangka aturan hukum dan perundang-undangan harus berkeadilan, ditegakkan dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum tentang hak azasi manusia.
4. Transparansi (Transparency): Transparansi harus dibangun dalam rangka kebebasan aliran informasi. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dimonitor.
5. Daya tangkap (Responsiveness): Setiap intuisi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders).
6. Berorientasi konsensus (consensus Orientation): Pemerintah yang baik akan bertindak sebagai penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesempatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.
7. Berkeadilan (Equity): Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
8. Efektifitas dan Efisiensi (Effectifitas and Effeciency): Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan berbagai sumber yang tersedia.
9. Visi Strategis (Strategic Vision): Para pemimpin dan masyarakat memiliki persfektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintah yang baik dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut.

2.1.3 Kinerja Pemerintah Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Abdul Rohman (2007) kinerja pemerintah daerah merupakan: "Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema stategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan juga bahwa kinerja merupakan prestasi

yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu."

Sedangkan menurut Wawan dan Lia (2009) menyatakan bahwa kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan-urusannya tersebut.

2.1.3.2 Indikator Kinerja

Menurut Mardiasmo (2004:121) menjelaskan bahwa Value For Money merupakan inti pengukuran kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dinilai dari sisi output yang dihasilkan saja, akan tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama. Bahkan, untuk beberapa hal perlu ditambahkan pengukuran distribusi dan cakupan layanan (equity & service coverage). Permasalahan yang sering dihadapi oleh pemerintah dalam melakukan pengukuran kinerja adalah sulitnya mengukur output, karena output yang dihasilkan tidak selalu berupa output yang berwujud, akan tetapi lebih banyak berupa intangible output.

2.1.4 Hubungan Pengawasan Intern dan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Hanif Nurcholis (2005:315) tujuan dari pengawasan adalah untuk meningkatkan kinerja. Pengawasan terhadap pemerintah daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan dengan rencana dan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah sesuai dengan bidang kewenangan masing-masing (Hanif Nurcholis, 2005:315).

Menurut Atep AB dan Bambang (2005:95) pengawasan intern perlu dilakukan bagi kepentingan manajemen dalam pemeriksaan kinerja yang dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien serta memenuhi sasarannya secara efektif.

2.1.5 Hubungan *Good Governance* dan Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut A. Chunaini Saleh, Ahmad Baedow (2008:2) menyebutkan bahwa istilah good governance pada dasarnya merupakan kinerja lembaga, seperti kinerja pemerintahan negara, perusahaan atau organisasi sosial di masyarakat yang telah memenuhi prasyarat-prasyarat yang telah tertentu seperti keikutsertaan anggota atau masyarakat dalam pengambilan setiap kebijakan (*participation),* tanggap terhadap aspirasi dari bawah *(responsiveness),* bertumpu pada asas *rule of law,* terbuka terhadap keragaman anggota *(inclusiveness),* dapat dipertanggungjawabkan *(accountability),*efektif, efisien, stabil, bersih *(check and balance),* serta adanya proses transparan.

Menurut Syamsudin Haris (2007:105) pemahaman dan penerapan secara komprehensif terhadap prinsip-prinsip *good governance* atau tata pemerintahan yang baik merupakan salah satu kinerja yang diharapkan dapat ditampilkan oleh eksekutif dalam mendukung otonomi daerah.

Tobari (2005:3) mengemukakan bahwa dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (*good governance),* menuntut kinerja setiap pejabat publik baik politisi maupun birokrasi, wajib bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan kepada publik segala sikap, perilaku dan kebijakannya dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diamanahkan kepadanya.

2.2 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2008:64), hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah:

a. Pengawasan intern dan *Good governance* berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur)
b. Pengawasan intern dan *Good governance* tidak berpengaruh

terhadap kinerja pemerintah daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur)

III OBJEK DAN METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Menurut Sugiyono (2002:58), Objek Penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan guna tertentu tesntang sesuatu hal yang objektif, valid, dan reliabel tentang suatu hal (variable tertentu). Objek penelitian ini adalah pengawasan intern dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah, yang akan ditinjau pada seluruh Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur.

3.2 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2007: 2), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu". Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan verifikatif.

Metode deskriptif menurut Sugiyono (2010:29), Metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Sedangkan menurut Mashuri (2009:45) metode verifikatif Memeriksa benar tidaknya apabila dijelaskan untuk menguji suatu cara dengan atau tanpa perbaikan yang telah dilaksanakan di tempat lain dengan mengatasi masalah yang serupa dengan kehidupan.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel X1 (Pengawasan Intern) dan X2 (*Good Governance*) terhadap Y (Kinerja Pemerintah Daerah). Verifikatif berarti menguji teori dengan pengujian suatu hipotesis apakah diterima atau ditolak..

3.2.1 Operasionalisasi Variabel

Menurut Sugiyono (2011:38), Variabel penelitian adalah segala suatu hal yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulan.

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu "Pengaruh pengawasan intern dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah", dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga variabel, yaitu:

1. Variabel independen (X1), yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independen (X1) dalam penelitian ini adalah Pengawasan Intern. Konsep variabel pengawasan intern adalah informasi-informasi yang dibutuhkan dalam pengawasan intern. Pengumpulan informasi mengenai variable ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan penyataan yang diajukan kepada responden, yang akhirnya di ranking berdasar skala ordinal.
2. Variabel independen (X2), yaitu variabel bebas yang keberadaannya tidak dipengaruhi oleh variabel-variabel lain. Variabel independen (X2) dalam penelitian ini adalah *Good Governance.* Pengumpulan informasi mengenai variable ini berdasarkan kuesioner, yang berupa daftar pertanyaan dan penyataan yang diajukan kepada r esponden, yang akhirnya di ranking berdasar skala ordinal.

3.2.2. Sumber dan Teknik Penarikan Sampel

3.2.2.1. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan skunder. Data primer Menurut Sugiyono (2009:137) adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini melalui cara menyebarkan kuesioner. Dan definisi data sekunder Menurut Sugiyono (2009:137) adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini yaitu mengumpulkan informasi berupa gambaran umum instansi, aktivitas serta dokumen-dokumen terkait dengan penelitian.

3.2.2.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur, yang mana Dinas itu sendiri terdiri dari 17 Dinas. Dan dalam penelitian ini jumlah sampel yang penulis ambil sebanyak 17 Dinas, dimana jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Hal ini penulis lakukan karena jumlah sample kurang dari 30, sehingga penulis perlu mengambil sample sebanyak 17 untuk mewakili populasi.

3.2.3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Studi Lapangan *(field research,* Yaitu dilakukan dengan peninjauan dan pengamatan langsung ke lapangan untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, penelitian ini dilakukan dengan cara:
2. Pengamatan Langsung (*Observasi*), yaitu melakukan pengamatan secara langsung dilokasi untuk memperoleh data yang diperlukan. observasi dilakukan dengan mengamati kegiatan Pemerintah Kota/Daerah yang berhubungan dengan variable penelitian. Hal dari observasi dapat dijadikan data pendukung dalam menganalisi dan mengambil kesimpulan.
3. Wawancara (*interview),* yaitu teknik pengumpulan data dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Penulisan mengadakan hubungan langsung dengan pihak yang dianggap dapat memberikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan. Dalam teknik wawancara ini, penulis mengadakan tanya jawab kepada sumber yang dapat memberikan data atau informasi. Informasi itu berupa yang berkaitan dengan pengawasan intern dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.
4. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk kemudian dijawab untuk memperoleh pengumpulan data efesiensi waktu serta sebagai petunjuk pengawasan intern dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah (survey pada Dinas Di Pemerintah Kabupaten Cianjur).
5. Studi Kepustakaan (*Library research*)

Penelitian ini dilakukan untuk menghimpun teori-teori, pendapat yang dikemukakan oleh para ahli, yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan. Serta dari literatur lainnya yang dijadikan sebagai landasan teoritis dalam rangka melakukan pembahasan. Landasan teori ini dijadikan sebagai pembanding dengan kenyataan di lembaga/perusahaan/instansi. Adapun buku-buku yang dijadikan referensi dalam penelitian ini adalah akuntansi sektor publik, teori dan konsep kebijakan publik, jurnal-jurnal ekonomi, buku tentang ilmu pemerintahan.

3.2.4 Rancangan Analisis dan Pengujian Hipotesis

Rancangan analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil observasi lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Peneliti melakukan analisa terhadap data yang telah diuraikan dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif.

3.2.4.1 Analisis Data Deskriptif

Dalam pelaksanaan, penelitian ini menggunakan jenis atau alat bentuk penelitian deskriptif yang dilaksanakan melalui pengumpulan data di lapangan. Penelitian Deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan apa yang dilakukan oleh berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk selanjutnya diolah menjadi data. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan

bagaimana masing masing variable penelitian. Metode kualitatif yaitu metode pengolahan data yang menjelaskan pengaruh dan hubungan yang dinyatakan dengan kalimat. Analisis kualitatif digunakan untuk melihat faktor penyebab.

3.2.4.2 Analisis Verifikatif

Menurut Sugiyono (2010:31), Dalam penelitian kuantitatif analisis data menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa statistik deskriptif dan inferensial/induktif. Statistik inferensial dapat berupa statistik parametris dan statistik nonparametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila penelitian dilakukan pada sampel yang dilakukan secara random. Data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, tabel ditribusi frekuensi, grafik garis, grafik batang, *piechart* (diagram lingkaran), dan pictogram. Pembahasan hasil penelitian merupakan penjelasan yang mendalam dan interpretasi terhadap data-data yang telah disajikan. Anali

3.2.4.2.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Penjelasan garis regresi menurut Andi Supangat (2007:352) yaitu “Garis regresi (*regression line*/*line of the best fit*/*estimating line*) adalah suatu garis yang ditarik diantara titik-titik (*scatter diagram*)sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk menaksir besarnya variabel yang satu berdasarkan variabel yang lain, dan dapat juga dipergunakan untuk mengetahui macam korelasinya (positif atau negatifnya)”.

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan seberapa besar pengaruh pengawasan intern dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Pengujian Validitas

Pengujian tingkat validitas item kuesioner menggunakan analisis item dengan cara mengkorelasikan skor tiap item dengan skor total yang merupakan jumlah tiap skor item. Item yang mempunyai korelasi positif dengan skor total korelasi yang tinggi, menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula.

Menurut Sugiyono (2014:363), validitas merupakan derajad ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan oleh peneliti. Berdasarkan definisi tersebut, maka validitas dapat diartikan sebagai suatu karakteristik dari ukuran terkait dengan tingkat pengukuran sebuah alat test (kuesioner) dalam mengukur secara benar apa yang diinginkan peneliti untuk diukur. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Apabila koefisien korelasi butir pernyataan dengan skor total item lainnya > 0,30 maka pernyataan tersebut dinyatakan valid (Barker *et al*, 2002:70).

Hasil uji validitas yang diperoleh untuk kuesioner dari ketiga variabel yaitu variabel Pengawasan Intern (X1), *good governance* dan variabel kinerja pemerintah daerah menghasilkan nilai r-hitung untuk masing-masing pernyataan lebih besar dari nilai r-tabel 0,361 yang menunjukan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan sudah melakukan fungsi ukurnya.

4.1.2 Pengujian Reliabilitas

Pengujian reliabilitas menggunakan dengan koefisien *Split Half* untuk mengetahui keandalan kuesioner sebagai alat ukur. Hasil pengukuran reliabel yang dapat diterima adalah koefisien positif dan di atas 0,7. Dari hasil pengujian reliabilitas instrumen, diperoleh nilai koefisien reliabilitas lebih besar dari 0,7 yang menunjukan bahwa seluruh pernyataan yang diajukan tersebut sudah menujukan keandalannya, sehingga ketiga variabel yang diuji tersebut sudah memenuhi syarat untuk digunakan dalam penelitian.

4.1.3 Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif bertujuan untuk melihat gambaran hasil penelitian mengenai pengawasan internal, *good governance* dan kinerja pemerintah daerah dengan sampel penelitian sebanyak 35 orang pegawai dinas

di Kabupaten Cianjur. Sedangkan untuk melihat jawaban atau penilaian responden terhadap setiap pernyataan yang diajukan dalam kuesioner, maka dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan distribusi frekuensi dan prosentase, sedangkan untuk melihat penilaian responden terhadap setiap variabel yang diteliti dapat dilihat dari nilai prosentase dari hasil skor aktual dan ideal yang diperoleh.

4.1.3.1 Tanggapan Responden Mengenai Pengawasan Internal

Berdasarkan hasil keseluruhan skor tanggapan responden mengenai pengawasan internal pada dinas di Kabupaten Cianjur yang diukur dengan 15 pernyataan dan terbagi menjadi lima dimensi, diperoleh skor aktual sebesar 2063 dengan skor ideal yang dicapai sebesar 2625. Berdasarkan hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor ideal yang telah dicapai tersebut, diperoleh nilai persentase sebesar 78,6%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa pengawasan internal pada Dinas-Dinas di Kabupaten Cianjur sudah dilakukan dengan baik.

4.1.3.2 Tanggapan Responden Mengenai *Good Governance*

Berdasarkan hasil keseluruhan skor tanggapan responden mengenai *good governance* pada dinas di Kabupaten Cianjur yang diukur dengan 10 pernyataan dan terbagi menjadi sembila dimensi, diperoleh skor aktual sebesar 1328 dengan skor ideal yang dicapai sebesar 1750. Dari hasil perbandingan atara skor aktual dengan skor ideal yang telah dicapai, diperoleh nilai persentase sebesar 75,9%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa dinas-dinas pada Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah dilakukan dengan baik.

4.1.3.3 Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil keseluruhan skor tanggapan responden mengenai kinerja pemerintah pada dinas di Kabupaten Cianjur yang diukur dengan 7 pernyataan dan terbagi menjadi tiga dimensi, diperoleh dari ketiga dimensi yang diajukan sebesar 963 dengan skor ideal yang dicapai sebesar 1225. Dari hasil perbandingan antara skor aktual dengan skor idea, diperoleh nilai persentase sebesar 78,6%. Nilai ini berada dalam kelas interval antara 68,01% - 84% dan berada dalam kategori baik. Hal ini menunjukan bahwa dinas-dinas Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki kinerja yang baik.

4.1.4 Pengaruh Pengawasan Internal dan *Good Governance* Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan internal dan *good governance* terhadap kinerja pemerintah daerah dengan menggunakan analisis regresi linier berganda yang terdiri dari persamaan regresi linier berganda, analisis korelasi, analisis koefisien determinasi dan pengujian hipotesis.

4.1.4.1 Persamaan Regresi Linier Berganda

Model persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2$$

Keterangan :
a : Konstanta
Y : Kinerja Pemerintah
X_1 : Pengawasan Internal
X_2 : *Good Governance*
b_1 dan b_2: Koefisien regresi

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.1
Persamaan Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	1,995	2,300		,868	,392
	Pengawasan Internal	,279	,058	,595	4,785	,000
	Good Governance	,202	,078	,322	2,588	,014

a. Dependent Variable: Kinerja

Dari tabel output di atas diperoleh nilai a sebesar 1,995, β_1 sebesar 0,279 dan

β_2 sebesar 0,202. Dengan demikian, persamaan regresi linier berganda yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y= 1,995 +0,279X_1 + 0,202X_2$$

Dari hasil persamaan regresi linier berganda tersebut masing-masing variabel dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 1,995 menyatakan bahwa ketika pengawasan internal dan *good governance* bernilai 0 (nol) dan tidak ada perubahan, maka kinerja pemerintah akan bernilai sebesar 1,995.
b. Variabel X_1 yaitu pengawasan internal memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,279, artinya ketika pengasawan internal mengalami peningkatan, sementara *good governance* konstan, maka kinerja pemerintah akan meningkat sebesar 0,279 kali.
c. Variabel X_2 yaitu *good governance* memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,202, artinya ketika *good governance* mengalami peningkatan, sementara pengawasan internal konstan, maka kinerja pemerintah akan meningkat sebesar 0,202 kali.

4.1.4.2 Analisis Korelasi

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linier antara dua variabel. Analisis korelasi yang akan disajikan dalam penelitian ini terdiri dari analisis korelasi simultan dan analisis korelasi parsial.

4.1.4.2.1 Analisis Korelasi Simultan

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi simultan antara pengawasan internal dan *good governance* dengan kinerja pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4.2
Hasil Analisis Korelasi Simultan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,718[a]	,515	,485	1,15394

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengawasan Internal

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara pengawasan internal dan *good governance* dengan kinerja pemerintah sebesar 0,718. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,718 termasuk kedalam kategori hubungan yang cukup tinggi, berada dalam kelas interval antara 0,61 – 0,80 (Syahri Alhusin, 2003:157).

4.1.4.2.1 Analisis Korelasi Parsial

Dengan menggunakan *software* SPSS, diperoleh hasil analisis korelasi parsial antara pengawasan internal dan *good governance* dengan kinerja pemerintah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Analisis Korelasi Parsial

Correlations

		Kinerja
Pengawasan Internal	Pearson Correlation	,643
	Sig. (2-tailed)	,000
	N	35
Good Governance	Pearson Correlation	,411
	Sig. (2-tailed)	,014
	N	35

1. **Hubungan Antara Pengawasan Internal dengan Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara pengawasan internal dengan kinerja pemerintah sebesar 0,643. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik pengawasan internal, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kinerja pemerintah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,643 termasuk kedalam kategori hubungan yang cukup tinggi, berada dalam kelas interval antara 0,61 – 0,80.

2. **Hubungan Antara *Good Governance* dengan Kinerja Pemerintah**

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai korelasi yang diperoleh antara *good governance* dengan kinerja

pemerintah sebesar 0,411. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik *good governance*, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kinerja pemerintah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,411 termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang, berada dalam kelas interval antara 0,41 – 0,60.

4.1.4.3 Analisis Koefisien Determinasi

Analisis Koefisiensi Determinasi (KD) digunakan untuk melihat seberapa besar variabel independen (X) berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) yang dinyatakan dalam persentase. Dalam hal ini untuk melihat besar kontribusi pengaruh yang diberikan oleh pengawasan internal dan *good governance* dengan kinerja pemerintah. Dengan menggunakan SPSS, diperoleh koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel output berikut:

Tabel 4.4
Koefisien Determinasi Simultan

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,718[a]	,515	,485

a. Predictors: (Constant), Good Governance, Pen Internal

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh informasi bahwa nilai koefisien korelasi atau R) yang diperoleh sebesar 0,718. Dengan demikian koefisien determinasi dapat dihitung sebagai berikut:

$$Kd = (r)^2 \times 100\ \%$$

$$Kd = (0{,}718)^2 \times 100\ \%$$

$$Kd = 51{,}5\%$$

Dari perhitungan di atas terlihat bahwa nilai koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 51,5%. Hal ini menunjukan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari pengawasan internal dan *good governance* memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja pemerintah sebesar 51,5%, sedangkan sisanya sebesar 48,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti. Sedangkan untuk melihat besarnya kontribusi pengaruh yang diberikan oleh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dapat diketahui dengan mengalikan antara nilai *beta* dengan zero order sebagai berikut:

Tabel 4.5
Koefisien Determinasi Parsial

Coefficients[a]

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	Pengawasan Internal	,595	,643
	Good Governance	,322	,411

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan output di atas dilakukan perhitungan sebagai berikut:

Pengaruh X_1 terhadap Y = 0,595 x 0,643 = 0,383 atau 38,3%

Pengaruh X_2 terhadap Y = 0,322 x 0,411 = 0,132 atau 13,2%

Dari hasil perhitungan di atas, terlihat bahwa pengawasan internal memberikan kontribusi paling dominan terhadap kinerja pemerintah dengan kontribusi yang diberikan sebesar 38,3%, sedangakn 13,2% lainnya diberikan oleh *good governance.*

4.1.4.4 Pengujian Hipotesis

4.1.4.4.1 Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas yang terdiri dari pengawasan internal dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka dilakukan pengujian hipotesis dengan rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari pengawasan internal dan *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_1 : \beta_1 \neq \beta_2 \neq 0$, artinya kedua variabel bebas yang terdiri dari pengawasan internal dan

good governance berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Taraf signifikansi (α) : 0,05

Kriteria uji : tolak H_0 jika nilai t-hitung > t-tabel, H_1 terima

Nilai statistik uji F dapat diketahui dari tabel output berikut:

Tabel 4.6
Pengujian Hipotesis Simultan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	45,301	2	22,651	17,010	,000[b]
	Residual	42,611	32	1,332		
	Total	87,912	34			

a. Dependent Variable: Kinerja

b. Predictors: (Constant), Good Governance, Pengawasan Internal

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 17,010. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai F_{tabel} pada tabel distribusi F. Dengan α=0,05, db_1=2 dan db_2=32, diperoleh nilai F-tabel sebesar 3,295. Dari nilai-nilai di atas, terlihat bahwa nilai F_{hitung} (17,010) > F_{tabel} (3,295), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri pengawasan internal dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

1. Pengujian Hipotesis Parsial X_1

$H_0 : \beta_1 = 0$ Artinya, secara parsial pengawasan internal tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$ Artinya, secara parsial pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_1 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pengujian Hipotesis Parsial X_1

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,995	2,300		,868	,392
	Pengawasan Internal	,279	,058	,595	4,785	,000
	Good Governance	,202	,078	,322	2,588	,014

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh pengawasan internal sebesar 4,785. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=35-2-1= 32, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 2,036. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh berada diluar nilai t_{tabel} (-2,036 dan 2,036), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

2. Pengujian Hipotesis Parsial X_2

$H_0 : \beta_2 = 0$ Artinya, secara parsial *good governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

$H_1 : \beta_2 \neq 0$ Artinya, secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Dengan taraf signifikansi 0,05

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis parsial X_2 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Pengujian Hipotesis Parsial X_2

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,995	2,300		,868	,392
	Pengawasan Internal	,279	,058	,595	4,785	,000
	Good Governance	,202	,078	,322	2,588	,014

a. Dependent Variable: Kinerja

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai t-hitung yang diperoleh *good governance* sebesar 2,588. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t-tabel pada tabel distribusi t. Dengan α=0,05, df=n-k-1=35-2-1= 32, diperoleh nilai t-tabel untuk pengujian dua pihak sebesar ± 2,036. Dari nilai-nilai di atas terlihat bahwa nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,588), berada diluar nilai t_{tabel} (-2,036 dan 2,036), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Pengawasan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi pengawasan internal dengan kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0,643. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukkan bahwa yang terjadi antara variabel pengawasan intern dengan variabel kinerja pemerintah daerah adalah searah. Dimana semakin tinggi pengawasan intern, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kinerja pemerintah daerah. Tingkat keeratan korelasi 0,643 termasuk dalam kategori hubungan cukup tinggi, karena berada pada interval 0.61 – 0, 80.

Hasil dari koefisien determinasi, pengawasan intern berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan besar pengaruh 38,3%. Hasil tersebut menunjukkan jika pengawasan intern lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dan 13,2% diperngaruhi oleh *good governance,* sedangkan sisanya sebesar 48,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil hipotesis nilai t_{hitung} (4,785) yang diperoleh berada diluar nilai t_{tabel} (-2,036 dan 2,036), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinera pemerintah daerah.

Dalam peningkatan kinerja Pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur perlu mempertimbangkan indikator variabel pengawasan intern dan kinerja Pemerintah daerah yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu:

1. Dimensi lingkungan pengendalian terutama indikator penegakan intergritas dan nilai etika perlu ditingkatkan untuk mengetahui sistem informasi dan sistem akuntansi diorganisir.
2. Dimensi penaksiran risiko perlu ditingkatkan untuk mencapai tujuan organisasi.
3. Dimensi kegiatan pengendalian, terutama dalam pencatatan transaksi perlu ditingkatkan lagi, sehingga dapat mendorong kinerja dan kehandalan informasi.
4. Dimensi informasi dan komunikasi perlu ditingkatkan lagi karena sangat penting bagi keberhasilan atau peningkatan mutu operasional organisasi. Kemudian dapat memberikan data yang berhubungan dengan sasaran, akurat dan terperinci, dan mudah dipahami/digunakan.
5. Dimensi monitoring juga perlu ditingkatkan untuk memastikan kehandalan informasi dan *internal control* dari waktu ke waktu.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh nilai t-hitung

Untuk mencapai kinerja pemerintah daerah yang baik, maka pengawasan intern harus ditingkatkan pada setiap Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur. Karena pengawasan intern sangat mempengaruhi kinerja Pemerintah daerah yaitu untuk membantu manajemen melaksanakan tanggungjawabnya dalam mencapai kinerja secara efektif. Pengawasan intern dapat memberikan dukungan terhadap responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas Pemerintah. Semakin baik pengawasan intern yang dilaksanakan akan memberi dampak semakin baik kinerja Pemerintah daerah yang disampaikan.

4.2.2 Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hubungan antara *good governance* dengan Kinerja pemerintah daerah berada pada arah positif. Artinya hubungan antara *good governance* dengan Kinerja pemerintah daerah termasuk Cukup Kuat. Ini menggambarkan bahwa ketika *good governance* semakin baik, maka akan meningkatkan Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di wilayah Kabupaten Cianjur.

Melalui data yang terkumpul dilapangan, terbukti bahwa ada pengaruh yang signifikan dari *good governance* terhadap Kinerja pemerintah daerah pada Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di wilayah Kabupaten Cianjur.

Berdasarkan hasil dari nilai korelasi *Good Governance* dengan kinerja pemerintah daerah adalah sebesar 0,411. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi antara keduanya adalah searah. Dimana semakin baik *good governance*, maka akan diikuti pula oleh semakin baiknya kinerja pemerintah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,411 termasuk kedalam kategori hubungan yang sedang, berada dalam kelas interval antara 0,41 – 0,60.

Hasil dari koefisien determinasi, *Good Governance* berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintah daerah dengan besar pengaruh 13,2%. Hasil tersebut menunjukkan jika *Good Governance* lebih baik maka dalam pelaksanaannya akan meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Dan 38,3% dipengaruhi oleh pengawasan internal sedangkan sisanya 48,5% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak diteliti namun diyakini turut mempengaruhi kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil hipotesis nilai t_{hitung} yang diperoleh (2,588), berada diluar nilai t_{tabel} (-2,036 dan 2,036), sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima, artinya secara parsial *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menunjukkan bahwa apabila *good governance* sudah baik, maka kinerja pemerintah daerah akan lebih baik, dengan baiknya *good governance*, maka tingkat kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

4.2.3 Pengaruh Pengawasan Intern dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, hasil dari nilai korelasi yang diperoleh antara pengawasan internal dan *good governance* dengan kinerja pemerintah seebsar 0,718. Nilai korelasi bertanda positif, yang menunjukan bahwa hubungan yang terjadi adalah searah. Berdasarkan interpretasi koefisien korelasi, nilai sebesar 0,718 termasuk kedalam kategori hubungan yang cukup tinggi, berada dalam kelas interval antara 0,61 – 0,80.

Hasil dari koefisien determinasi, menunjukan bahwa kedua variabel bebas yang terdiri dari pengawasan internal dan *good governance* memberikan kontribusi pengaruh terhadap kinerja pemerintah sebesar 51,5%, sedangkan sisanya sebesar 48,5% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti.

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel (F_{hitung} = 17,010 > F_{tabel} =3,295). sesuai dengan kriteria pengujian hipotesis bahwa H_0 ditolak dan H_1 diterima. Artinya secara simultan kedua variabel bebas yang terdiri pengawasan internal dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, jelas menunjukkan bahwa apabila pengawasan internal dan *good governance* sudah dilakukan dengan baik, maka kinerja pemerintah daerah akan meningkat.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengawasan internal yang telah dilkukan pada dinas-dinas

Pemerintah Kabupaten di Cianjur dinilai baik.
2. Penerapan *Good Governance* pada Dinas Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah diterapkan dengan baik.
3. Pemerintah Daerah pada dinas-dinas Kabupaten Cianjur memiliki kinerja pemerintah yang baik.
4. Secara parsial, pengawasan internal berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur dengan kontribusi yang diberikan sebesar 38,3%.
5. Secara parsial, *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah Kabupaten Cianjur dengan kontribusi yang diberikan sebesar 13,2%.
6. Secara simultan, pengawasan internal dan *good governance* berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah pada Pemerintah Kabupaten dengan kontribusi yang diberikan sebesar 51,5%, sedangkan sisanya sebesar 48,5% merupakan kontribusi yang diberikan variabel lain yang tidak diteliti.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang Pengaruh Pengawasan Intern dan *Good Governance* terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survey pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur) maka penulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh Dinas Kabupaten Cianjur dan peneliti selanjutnya untuk dapat mencapai optimalisasi pengawasan intern, *Good Governance* dan kinerja pemerintah daerah, yakni sebagai berikut:

1. Lebih meningkatkan pengawasan intern Pada setiap Dinas di Kabupaten Cianjur. Terutama pada indikator lingkungan pengendalian perlu ditingkatkan agar menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern dalam lingkungan kerja .
2. Meningkatkan pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance)* pada jajaran instansi pemerintah Kabupaten Cianjur, demi meningkatkan kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur dan Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas dalam menjalankan setiap program pemerintah.
3. Kinerja pemerintah daerah pada Dinas di Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pencapaian program yang perlu memuat prioritas pembinaan dengan target pencapaiannya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang perlu sehingga target pencapaian suatu program dapat dipenuhi dan dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai.
4. Untuk memperoleh gambaran yang lebih luas, perlu penelitian lanjutan tentang pengaruh pengawasan intern dan *good governance* dalam peningkatan kinerja pemerintah daerah pada lokasi penelitian yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

Alhusin, Syahri. (2003). *Aplikasi statistik dengan SPSS.10 for windows.* yogyakarta: graha ilmu

Barata , Atep Adya, Bambang Trihartanto. (2005). *Perbendaharaan dan pemeriksaan keuangan negara/daerah*. Jakarta: Elex Media Komputindo

Barker, C. Pistrang., & Elliot, R. (2002). *Research Methods in Clinical Psychology* (2nd ed.). Chichester: John Wiley & Sons

Boynton dan Kell. (2006). *Modern Auditing*. Eight Edition, United States: John Wiley& Sons Inc

Boyntonn, William C, Johnson, Raymond N., and Kelly, Walter G. (2001). *Modern Auditing*. 7th Edition. New York: John Wiley and Sons Inc.

Daniri. (2006). *Konsep dan penerapan good corporate governance dalam konteks indonesia*. Jakarta: ray indonesia

Effendy, Asep. (2012). *Pengaruh Pengawasan Dan Internal Control Terhadap Good Governance.*

Akuntabil Itas Vol 11 No.2 | Maret 2012. ISSN 1412 – 0240

Fawzi, Anggi. (2012). *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Pemerintahan (Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Pemerintah Kota Tasikmalaya)*

Gondodiyoto, sanyoto. (2009). *Pengelolaan fungsi Audit Sistem Informasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media

Gujarati, Damodar. (2003). *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga

Gusti, Agung. (*2008)*. *Audit Kinerja Pada Sektor Publik.* Jakarta : Grafindo

Harian Seputar Indonesia. (2011)

Haris, Syamsuddin. (2007). *Desentralisasi & otonomi daerah.* Jakarta: LIPI press.Yayasan Obor Indonesia

Herry, Achmad. (2005). kunci sukses tim sukses dalam pilkada langsung. Yogyakarta: Galang press

IHPS Semester I Tahun 2011 . www.bpk.go.id

IHPS Semester I Tahun 2014. www.bpk.go.id

Indeks nasional. (2012)

Jubaedah. (2007). *Pengembangan good corporate governance dalam rangka reformasi badan usaha milik negara*. Jurnal ilmu administrasi, 4(1):45-55

Kepmendagri No.13 Tahun 2006 bab1 Pasal 1 ayat 8

Kusmayadi, Dedi. (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Penatausahaan Keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Survei Pada Pemerintahan Kotan Tasikmalaya)*. Jurnal Ichsan Gorontalo. Volume.4.No.2 Edisi Mei-Juli 2009. ISSN: 1907-5324

LAN & BPKP. (2000) *Akuntabilitas dan Good Governance.* Jakarta: LAN

Lawrence, Sawyer. (2003). *Internal Auditing-Auditing Internal Sawyer : Buku 1.* Jakarta :Salemba empat

Mahsun, Mohamad. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta: BPFE Universitas Gajah Mada

Mardiasmo. (2002).(2004).(2011). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Mardiasmo. (2004). *Ototnomi dan manajemen keuangan daerah*. yogyakarta: Andi Offset.

Maschab, Mashuri. (2009). *Kekuasaan Eksekutif di Indonesia*. Jakarta :Rineka Cipta.

Mifti, Sri, dkk. (2009). *Pengawasan Internal Dan Kinerja (Suatu Kajian Di Kantor Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri)*. Jurnal Ekonomi Bisnis No. 3 Vol. 14, Agustus 2009

Mulyadi. (2002). *Auditing* **.** Buku Dua, Edisi Ke Enam. Jakarta: Salemba Empat.

Mulyawan, Budi. (2009). *"Pengaruh Pelaksanaan Good Governance terhadap Kinerja Organisasi".*Journal Article**.**

Narimawati, Umi. (2008). *Analisis Multifariat Untuk Penelitian Ekonomi*.Yogyakarta :Penerbit Graha Ilmu.

Narimawati, Umi. (2008). *Metodologi Penelitian Kulitatif dan Kuantitatif*: *teori dan aplikasi*

Narimawati, Umi. (2010). *Metode penelitian :Dasar Penyusunan Penelitian Ekonomi.* Jakarta: Penerbit Genesis.

Narimawati, Umi., Anggadini, Dewi.,Ismawati, Linna. (2010). *Penulisan Karya Ilmiah: Panduan Awal Menyusun Skripsi dan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi Unikom*. Bekasi: Genesis

Nawawi. (2000). *Pengawasan Intern*. Bandung: Alfabeta

Nazir, Moh. (2003). *Metode Penelitian.* Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ningsih, Nining Ade, dkk. *Analisis Hubungan Prinsip-Prinsip Good Governance Dengan Kinerja Pegawai Di Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur*

Nurcholis, Hanif. (2005). *Teori&Praktik Pmrintahan&Otda (Rev)*. Jakarta:Grasindo

Okezone. (2012)

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

Peraturan Pemerintah No.60 tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000

Peraturan Pemerintah RI No 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Pikiran rakyat. (2009)

Poltak Sinambela, Lijan. (2012). *Kinerja Pegawai:Teori Pengukuran dan Implikasi.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Rasyid, Harun Al. (1994). *Dasar-Dasar Statistika Terapan, Program Pascasarjana.* Bandung : Unpad.

Rohman, Abdul. (2007). *Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Dan Fungsi Pemeriksaan Intern Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.* Jurnal Maksi, 7(2), 206-220.

Rohman, Abdul. (2009). *Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah.* Jurnal Akuntansi Dan Bisnis, 9(1), 21-32. ISSN 1412-0852

Saleh, A. Chunaini,. Ahmad Baedowi. (2008). *Penyelenggaraan haji era reformasi: analisis internal kebijakan publik.*Tangerang: Pustaka alvabet

Standar Profesional Akuntan Publik (2001:SA 319.2 Part06)

Sugiyono. (2007). (2008). (2011). *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta

Sugiyono. (2009). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Badung: Alfabeta

Sugiyono. (2009). *Statistika untuk Penelitian*. Cetakan Keduabelas. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif Kuaitatif dan R&D.* Alfabeta: Bandung

Sukmana, Wawan, Lia Anggarsari. (2009). *Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya) .* Jurnal Akuntansi Fe Unsil, Vol. 4, No. 1, 2009 ISSN : 1907 – 9958

Supangat, Andi. (2007). *Statistika*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group

Tuasikal, Askam. (2008). *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah.* Finance And Banking Journal, 10(1), 66-88. ISSN : 1410-8623

Ulum, Ihyaul. (2009). *Audit Sektor Publik: Suatu Pengatar*. Jakarta: Bumi Aksara

Undang-undang No. 22 tahun 1999 diperbarui dengan Undang-undang no.32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Wahyudin, Agus. (2009). *Analisis Hubungan Motivasi, Good Governance Terhadap Kinerja Institusi Pendidikan Yang Dimoderasi Karaktersitik Biografi*. Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 1, No. 1, Maret 2009, Pp. 14-22. ISSN 2085-4277

Widanarto, Agustinus. (2012). *Pengawasan Internal, Pengawasan Eksternal Dan Kinerja Pemerintah*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, Volume 12, Nomor 1, Juli 2012: 1 – 73

Yuda, Prima. (2012). *Pengaruh Pelaksanaan Good Governance Dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi*

(Survey Pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya